

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman saat ini telah mendorong kemajuan dunia bisnis ke arah yang lebih produktif, ditambah lagi dunia telah berada pada fase revolusi industri 4.0, hal tersebut di buktikan dari penggunaan teknologi-teknologi canggih serta mudahnya akses informasi. Revolusi industri 4.0 dikenal pula dengan jaman milenial dimana seluruh aktivitas saat ini melibatkan kecerdasan buatan, dan internet (Binus.ac.id, 2019). Perusahaan-perusahaan besar saat ini mulai menggantikan tenaga manusia dengan tenaga-tenaga mesin, sehingga dengan semakin tingginya penggunaan mesin akan mempermudah aktivitas bisnis dan perindustrian. Kemajuan teknologi dan informasi yang digunakan perusahaan dalam aktivitas bisnisnya, mengharuskan perusahaan untuk bertanggungjawab atas segala aktivitasnya terutama yang berhubungan dengan sosial dan lingkungan. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa aksi korporasi yang secara nyata dilakukan untuk menanggulangi dampak yang diakibatkannya serta memberikan masyarakat dan pemerintah hak atas transparansi informasi yang tercermin melalui laporan tahunan.

Dalam laporan tahunan, perusahaan wajib mencantumkan gambaran tanggung jawab usaha di bidang sosial dan lingkungan atau lebih sering disebut dengan *corporate social responsibility* (CSR). Secara sederhana tanggung jawab sosial atau CSR ini dimaknai sebagai bentuk kepedulian badan usaha sebagai unsur pemanfaat sumber daya alam, kepada alam dan sosial masyarakat sebagai unsur yang dimanfaatkan atau bisa juga dinyatakan sebagai komitmen perusahaan untuk tetap

menjaga lingkungan alam dan sosial guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan pada tanggung jawab sosial yang harus dipertimbangkan, menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya mengutamakan keuntungan dengan mengedepankan aspek ekonomi, namun juga harus bertumpu pada aspek yang lebih luas seperti lingkungan alam dan masyarakat. Ketiga aspek tersebut lebih sering disebut *Triple Bottom Line* yang merupakan konsep yang dipegang teguh perusahaan dalam menciptakan usaha yang berkelanjutan, aspek ini mencakup *profit, people, dan planet* yang selanjutnya dikenal dengan sebutan 3P (Elkington.1997). Aspek ekonomi merupakan perwujudan dari keinginan pemangku kepentingan yang pada akhirnya akan diutarakan melalui laporan keuangan. Aspek lingkungan dan sosial berhubungan dengan alam dan masyarakat, alam memiliki sumber daya yang melimpah yang menjadi bahan baku utama dari keseluruhan kegiatan bisnis sedangkan masyarakat merupakan entitas yang dituju dalam penjualan produk atau jasa. Aspek lingkungan dan sosial akan memunculkan tanggung jawab sosial yang pada nantinya akan mempengaruhi terhadap eksistensi perusahaan di mata masyarakat dan dalam upaya mewujudkan pelestarian lingkungan.

Konsep tanggung jawab sosial (CSR) telah ditekankan pada aturan perseroan terbatas pasal 74 (UU No 40 Tahun 2007), menegaskan bahwa : Perseroan yang melaksanakan aktivitas operasional pada jenis atau berhubungan dengan sumber alam harus melaksanakan kewajiban pada aspek sosial dan lingkungan, Tanggung jawab sosial dan lingkungan diartikan sebagai komitmen perseroan terbatas yang dirancang dan dihitung sebagai biaya usaha yang pengalokasiannya dilaksanakan melalui penyesuaian kepatuhan dan kelaziman, Merujuk pada ketetapan peraturan

perundang-undangan bagi perseroan yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi, Regulasi berikutnya terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun melalui Peraturan Pemerintah. Selain itu, kewajiban melakukan CSR juga diperuntukkan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia sesuai dengan aturan penanaman modal (UU No 25 Tahun 2007) pada Pasal 15, 17, dan 34.

Pemerintah Indonesia dalam usaha untuk menggaungkan CSR telah berupaya melakukan program-program bagi perusahaan, salah satunya yaitu program yang diusung oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan). Program ini merupakan usaha dalam rangka menilai tingkat kinerja perusahaan dalam usaha untuk mengelola lingkungan aktivitas operasional perusahaan. Program ini melibatkan beberapa komponen sosial yaitu pihak pengawas (pemerintah daerah maupun pusat), pihak yang diawasi (perusahaan dan organisasi terkait), dan masyarakat sebagai pemberi informasi tentang kinerja perusahaan. PROPER memiliki beberapa kriteria dalam menilai kinerja perusahaan, yaitu: emas untuk kegiatan usaha yang telah konsisten dalam melaksanakan tanggung jawab sosial, hijau untuk kategori usaha yang telah berupaya dalam penanggulangan dampak lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam aturan program, biru untuk kegiatan usaha yang melaksanakan penanggulangan dampak lingkungan sesuai dengan yang dipersyaratkan, merah untuk kegiatan usaha yang melakukan penanggulangan dampak lingkungan kurang dari yang dipersyaratkan, dan hitam untuk kegiatan usaha yang dengan sengaja lalai dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Meskipun CSR telah digaungkan untuk seluruh korporasi melalui peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah serta program pemerintah, tetap saja terjadi pelanggaran. Mudahnya aktivitas bisnis saat ini justru memicu semakin serakahnya korporasi-korporasi dalam memanfaatkan lingkungan alam dan sosial, dan muncul istilah eksploitasi. Eksploitasi merupakan aktivitas pemanfaatan segala sesuatu secara berlebihan, dalam hal ini lingkungan yang dieksploitasi. Contoh eksploitasi, misalkan perusahaan kertas dan perusahaan furnitur yang bahan produknya bersumber dari pohon, pohon yang terus di tebang tanpa adanya penanaman kembali akan berakibat pada bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, dll. Dampak dari eksploitasi itu memunculkan ketidakseimbangan lingkungan, yang pada akhirnya membawa pada bencana alam dan ketidakpuasan masyarakat sekitar terhadap perusahaan. Eksploitasi menunjukkan ketidakpedulian perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.

Kasus ketidakpedulian perusahaan terhadap lingkungan sangat banyak terjadi, salah satunya peristiwa pencemaran Sungai Citarum oleh PT Kemarga Kurnia Textile Industri dan PT How Are You Indonesia. Berdasarkan gugatan dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dijelaskan bahwa terdapat dua perusahaan yang terbukti mencemari Daerah Aliran Sungai Citarum, pencemaran tersebut membawa dampak bagi masyarakat, ekonomi dan kerusakan ekosistem (Mongabay.co.id, 2020). Selain itu terdapat kasus pencemaran yang menyeret perusahaan migas dan tambang yaitu PT Pertamina EP, PT Chevron Pasific Indonesia, PT Pertamina Hulu Energi NSB, Exxon Mobil Indonesia, PT Pertamina Hulu yang telah terbukti melakukan aktivitas pencemaran lingkungan, dari perusahaan pertambangan yaitu PT PPCI, PT Laman Mining, PT Indominco

Mandiri, dll (Katadata.co.id, 2019). Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang telah di laporkan oleh Kementerian LHK, baik yang hanya diperingatkan maupun yang telah dikenakan sanksi. Bukti lain yang diperoleh melalui pelaksanaan program PROPER masih terdapat banyak perusahaan yang memiliki kategori merah dan hitam tahun 2017-2019, sebagai berikut :

Tabel 1.1. Pringkat Merah dan Hitam PROPER 2017-2019

Tahun	Kategori Merah	Kategori Hitam
2017	130	1
2018	241	2
2019	303	2

Sumber : SK Peringkat PROPER 2017-2019

Berkaca dari data tersebut, disimpulkan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan atas perusahaan yang kurang dalam melakukan pengelolaan lingkungan serta terjadi peningkatan jumlah untuk perusahaan yang sama sekali tidak melakukan pengelolaan lingkungan pada tahun 2018. Meskipun jumlah dalam kategori hitam sedikit, tetap saja memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan. Apabila tidak segera ditanggulangi maka, hal ini dapat berpotensi menumbuhkan bibit ketidakpedulian lainnya.

Masalah ketidakpedulian menunjukkan rendahnya aktivitas pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Ada beberapa aspek yang mempengaruhi rendahnya aktivitas pengungkapan yaitu kinerja lingkungan dan keuangan perusahaan. Kinerja lingkungan merupakan ukuran sejauh mana suatu perusahaan memiliki dampak lingkungan dari aktivitas operasional yang dilakukannya. Semakin buruk kepedulian dan keikutsertaan perusahaan dalam mengelola lingkungan maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab sosial perusahaan rendah yang berakibat pada menurunnya citra perusahaan di mata masyarakat. Menurut

(Rutinaias, 2016), perusahaan atau korporasi yang memiliki kesadaran akan pentingnya penetapan kinerja lingkungan yang baik merupakan penampakan dan titik pertemuan antara kepentingan pemangku kepentingan yang etis dan inti pembangunan berkelanjutan, melalui pengintegrasian pembangunan sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Kinerja keuangan menggambarkan sejauh mana pencapaian perusahaan dalam mengelola keuangannya, semakin tinggi tingkat kinerja perusahaan maka peluang perusahaan dalam mendapatkan modal dari investor akan meningkat, mengingat salah satu acuan investor melakukan investasi adalah melalui penilaian kinerja perusahaan dari laporan tahunan. Selain itu, kinerja keuangan menggambarkan sejauh mana perusahaan dapat memperoleh laba, mengelola modal, tingkat pemenuhan kewajiban perusahaan, dan kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya. Menurut (Rutinaias, 2016), dalam relasi antara kinerja keuangan dan *corporate social responsibility* terdapat tiga pokok pikiran, meliputi (1) adanya tanggung jawab sosial akan memunculkan pengeluaran tambahan dan akan menutupi peluang perolehan keuntungan sehingga dapat menurunkan rasio laba, (2) biaya tambahan yang dihasilkan dalam upaya pertanggungjawaban sosial akan berdampak netral terhadap rasio laba, (3) tanggung jawab sosial perusahaan akan memiliki implikasi positif terhadap rasio laba perusahaan.

Relasi yang terjadi antara kinerja lingkungan dan keuangan dengan pengungkapan CSR secara implisit didasari oleh beberapa teori. Adapun teori yang mendasarinya meliputi *legitimacy theory* dan *stakeholder theory*. Teori legitimasi merupakan pembentukan kesesuaian antara nilai-nilai sosial yang terkait tercermin

dalam aktivitas perusahaan beserta jumlah perilaku yang diakui dalam sistem kemasyarakatan yang lebih besar (Dowling dan Pfeffer, 1975:122). Dengan kata lain teori ini menunjukkan bahwa terdapat adanya keselarasan antara kegiatan operasional usaha dengan etika, norma, moral yang ada dalam sistem kemasyarakatan demi memperoleh sebuah pengakuan baik. Teori *Stakeholder* atau teori pemangku kepentingan adalah sebuah sistem manajerial yang menyarankan struktur, sikap, dan praktik yang apabila digabungkan akan menjadi sebuah arti dari manajemen pemangku kepentingan (Donaldson dan Preston, 1995). Pemangku kepentingan dalam korporasi terdiri dari investor, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, dll. Berkaca dari kedua teori tersebut, mengindikasikan bahwa perusahaan dalam aktivitas bisnis memiliki tanggungjawab atas kegiatannya terhadap pemangku kepentingan guna memperoleh pengakuan baik secara hukum dan norma, maka melalui tanggungjawab ini secara langsung akan berelasi dengan kinerja perusahaan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan kinerja keuangan dan kinerja lingkungan dalam kaitannya dengan CSR menunjukkan inkonsistensi hasil. Seperti penelitian yang dilaksanakan oleh Amelia dan Cahyati (2015), memaparkan bahwa kinerja lingkungan dan ukuran dewan komisaris terhadap CSR *disclosure* berpengaruh signifikan, sedangkan pengujian terhadap rasio keuangan dan size terhadap CSR *disclosure* tidak berpengaruh. Hasil tersebut sama dengan hasil yang diperoleh Natalia, dkk (2018), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja keuangan terhadap CSR tidak berpengaruh signifikan.

Berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, menurut penelitian yang digarap oleh ES Laili dan AS Dewi (2019), menunjukkan hasil bahwa kinerja keuangan

terhadap CSR berpengaruh secara signifikan. Hasil tersebut sama dengan penelitian yang digarap oleh A Meiyana dan MN Aisyah (2019), menunjukkan hasil bahwa CSR berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Selain itu menurut penelitian N Chanifah, dkk (2019), menunjukkan hasil antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan dengan pengungkapan informasi lingkungan terdapat pengaruh.

Berdasarkan fenomena dan masalah yang ditemukan pada beberapa penelitian sebelumnya, disimpulkan adanya inkonsistensi hasil penelitian, terutama yang berhubungan dengan kinerja keuangan perusahaan serta masalah terkait CSR sangat penting untuk ditindak lanjuti oleh perusahaan demi menjaga dan melestarikan lingkungan sehingga tercapai pembangunan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil variabel aspek lingkungan dan aspek keuangan dikarenakan aspek lingkungan merupakan faktor penentu dalam mewujudkan kehidupan yang baik sedangkan aspek keuangan adalah faktor dalam menentukan kesejahteraan. Selain itu, kinerja lingkungan dan kinerja keuangan yang berelasi dengan CSR menjadi komponen penting dalam menopang berdirinya perusahaan, sehingga menarik untuk diteliti seberapa besar pengaruhnya.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan standar penentuan CSR melalui standar yang lebih terstruktur, rinci, dan terbaru yaitu GRI Standar 2016. Beberapa penelitian terdahulu mengambil aspek kinerja keuangan dinilai dari profitabilitas, namun dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggabungkan dua rasio sekaligus yaitu *leverage* dan profitabilitas. Pengambilan rasio *leverage* didasarkan pada, bagaimana usaha perusahaan dalam mendanai aktivitya. Rasio profitabilitas juga mengalami perubahan dalam penelitian ini, dimana sebelumnya penelitian

terdahulu menggunakan rumus *Return On Asset* (ROA) atau *Return On Equity* (ROE), namun dalam penelitian ini memfokuskan pada penggunaan rasio NPM (*Net Profit Margin*). Dari beberapa pertimbangan di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian pada aspek CSR dengan mengambil data perusahaan pada BEI. Adapun judul penelitian: **ANALISIS PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR).**

1.2 Identifikasi Masalah

Latar belakang yang telah disampaikan, menunjukkan eksploitasi dan pencemaran lingkungan adalah ego manusia yang selalu tidak puas dengan pencapaiannya dan selalu ingin untuk lebih meningkatkan apa yang telah dia miliki, tak jarang mereka menggunakan segala cara demi mencapai keinginannya. Keinginan terbesar dari korporasi adalah untuk mencapai laba usaha yang tinggi dengan biaya yang rendah. Maka dari itu, jalan yang ditempuh perusahaan terkadang menyimpang dari norma dan etika di masyarakat. Semakin acuh suatu perusahaan terhadap lingkungan alam dan sosialnya justru akan memperburuk citra perusahaan dan lingkungan menjadi tercemar. Tidak hanya sampai disana, masalah ini juga berpotensi menggoyahkan keberlangsungan perusahaan, kinerja lingkungan menjadi buruk akibat ulah perusahaan yang semena-mena serta kinerja keuangan yang akan menjadi menurun akibat mengabaikan hak masyarakat dan lingkungan. Hal inilah yang perlu di perhatikan oleh perusahaan mengingat dampaknya bukan hanya menyerang perusahaan tapi juga masyarakat secara keseluruhan. Identifikasi masalah lainnya yaitu:

1. Kurang tegasnya penindakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang mengacuhkan aspek pertanggungjawaban sosial dan lingkungan.
2. Kurangnya komitmen pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas bisnisnya.
3. Terdapat adanya persepektif bahwa pertanggungjawaban sosial akan menimbulkan biaya yang berlebihan sehingga mengurangi laba.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diperuntukkan sebagai sarana kendali atas penelitian yang dilakukan agar tidak melebar dari inti masalah yang difokuskan serta agar penelitian lebih terarah yang pada akhirnya akan mempermudah pencapaian tujuan penelitian.

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian terdiri dari:

1. Menggunakan data perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Menggunakan data perusahaan yang menjadi peserta PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan) tahun 2017-2019.
3. Kinerja keuangan yang digunakan diukur melalui rasio profitabilitas dan leverage tahun 2017-2019.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah yang diterangkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah Kinerja Lingkungan Berpengaruh Signifikan Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?

2. Apakah Kinerja Keuangan Berpengaruh Signifikan Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
2. Untuk mengetahui apakah kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai guna baik secara teoritis serta praktis, adapun nilai guna tersebut yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu akuntansi sosial dan lingkungan, terlebih lagi penelitian ini diperlukan untuk dapat membuktikan kesesuaian antara apa yang diterangkan berdasarkan teori dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan berkenaan dengan pelaksanaan *corporate sosial responsibility*. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan pembelajaran akuntansi sosial dan lingkungan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian yang dilakukan bertujuan untuk berbagai pihak yang berkaitan dengan materi, adapun manfaat penelitian ini yaitu:

- Pihak Akademisi

Dapat digunakan sebagai referensi berkenaan dengan penelitian di bidang akuntansi sosial dan lingkungan serta sebagai penambah wawasan untuk lebih memahami mengenai konsep dasar yang menjadi unsur-unsur dalam pertanggungjawab perusahaan mencakup ekonomi, sosial, dan lingkungan.

- Pihak Perusahaan

Dapat digunakan sebagai acuan dalam memahami pentingnya komitmen dalam penyelenggaraan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk menunjang keberlanjutan usaha. Selain itu, melalui penelitian ini perusahaan dapat mengevaluasi diri tentang penyelenggaraan aktivitas sosial dan lingkungan.

- Pihak Pemerintah

Melalui penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi mengenai penerapan program-program dalam usaha untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta mengevaluasi peraturan yang telah diterapkan.

- Pihak Pembaca (Masyarakat Umum)

Dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah wawasan masyarakat tentang komponen penting yang menjadi satu kesatuan dalam pertanggungjawab perusahaan. Sehingga melalui penambahan wawasan tersebut dapat menjadi sarana dalam peningkatan kesadaran tentang pentingnya kesejahteraan bersama.